



9 772088 235001

PELUANG DAN TANTANGAN PENEMPATAN DANA PEMERINTAH PADA HIMBARA

Muhammad Insan Firdaus*

Abstrak

Pemerintah menempatkan dana Rp200 triliun di bank Himbara untuk memacu pertumbuhan kredit dan ekonomi. Namun, kebijakan ini dihadapkan pada tantangan lemahnya permintaan kredit, risiko kredit bermasalah, dan potensi moral hazard. Tulisan ini mengidentifikasi peluang dan tantangan dari kebijakan penempatan dana tersebut. Kebijakan ini berpeluang memperkuat intermediasi perbankan dan mendanai program prioritas. Di sisi lain, tantangan utamanya adalah memastikan dana tersalurkan ke sektor produktif dan hijau, bukan mengendap atau dialihkan ke surat berharga. Komisi XI DPR RI perlu mengawasi secara ketat penyaluran kredit agar tepat sasaran, mendorong penyederhanaan hambatan investasi, dan menjamin transparansi dalam penyaluran dana untuk program prioritas guna memaksimalkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pendahuluan

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa pemerintah telah menempatkan uang negara di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada 12 September 2025. Bank tersebut adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI), masing-masing menerima Rp55 triliun, sementara Bank Tabungan Negara (BTN) mendapatkan Rp25 triliun dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan likuiditas di sistem perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. (Kementerian Keuangan, 2025).

Kebijakan tersebut diresmikan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 tentang Penempatan Uang Negara dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. ("Bank Himbara Dapat," 2025). Kebijakan ini berpotensi memperkuat likuiditas perbankan, stabilisasi sistem keuangan, dan mendukung program-program prioritas pemerintah. Namun, implementasi kebijakan ini dihadapkan pada sejumlah tantangan yang berpotensi mengurangi efektivitasnya. Tantangan utama meliputi lemahnya permintaan kredit dan hambatan investasi, yang berisiko menyebabkan dana

*) Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. E-mail: muhammad.firdaus2@dpr.go.id

mengendap di perbankan. Selain itu, terdapat kekhawatiran akan memburuknya kualitas kredit, keamanan dana pemerintah yang penjaminannya terbatas, serta risiko tata kelola dan *moral hazard*. Tulisan ini membahas peluang dan tantangan yang dihadapi dari pemindahan dana pemerintah tersebut ke Himbara.

Peluang Penempatan Dana Pemerintah ke Himbara

Kebijakan penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun pada bank-bank Himbara menghadirkan sejumlah peluang strategis bagi pemulihan dan akselerasi perekonomian nasional. *Pertama*, penguatan intermediasi perbankan melalui efek pengganda kredit (*credit multiplier*), di mana dana sebesar Rp200 triliun bisa mendorong kredit senilai Rp600 triliun hingga Rp800 triliun ke masyarakat dan dunia usaha (Rianto, 2025). CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan alokasi pembiayaan tidak hanya diperuntukkan bagi sektor swasta, namun juga merata ke berbagai sektor lain yang mendukung penciptaan lapangan kerja (Sukmawijaya, 2025). Jika bank menyalurkan kredit ke sektor produktif seperti usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM), industri manufaktur, pertanian, dan infrastruktur maka roda ekonomi akan berputar lebih cepat. UMKM bisa memperluas usaha, industri bisa meningkatkan produksi, petani bisa membeli pupuk, dan sektor konstruksi bisa menyerap tenaga kerja.

Kedua, stabilisasi sistem keuangan dan nilai tukar rupiah. Bank yang sehat akan menciptakan sistem keuangan yang kokoh. Dengan cadangan likuiditas cukup, bank lebih tahan menghadapi guncangan global seperti krisis keuangan atau gejolak pasar modal (Rianto, 2025). Stabilitas ini merupakan prasyarat bagi peningkatan investasi asing langsung dan portofolio. Dalam jangka menengah, aktivitas ekonomi yang terdorong oleh kredit produktif berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sekaligus mendorong penerimaan pajak negara seiring dengan bertambahnya transaksi dan keuntungan usaha.

Ketiga, mempercepat realisasi program strategis pemerintah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu alternatif bagi Himbara untuk menopang perekonomian adalah dengan menyalurkan kredit ke sektor program prioritas pemerintah. Di antara program tersebut adalah kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi dan kredit usaha rakyat (KUR). Penempatan dana tersebut akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas kredit. Sasaran kredit tersebut antara lain: program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP), rumah bersubsidi, dan Makan Bergizi Gratis (MBG) (Primantoro, 2025).

Program KDMP/KKMP dapat ditransformasikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi digital di pedesaan. Himbara tidak hanya menyediakan modal kerja tetapi juga dapat mengintegrasikan platform digital untuk pemasaran, pembukuan, dan distribusi, sehingga menciptakan koperasi yang modern dan berdaya saing. Pada program MBG, penyaluran kredit bisa difokuskan pada peternak dan petani lokal sebagai pemasok bahan baku, sehingga mendorong kemandirian pangan dan menguatkan ekonomi sirkular di dalam negeri.



Tantangan Penempatan Dana Pemerintah ke Himbara

Kebijakan penempatan dana pemerintah pada bank-bank Himbara merupakan langkah ekspansif yang bertujuan memacu pertumbuhan kredit dan sektor riil. Namun, kebijakan ini dihadapkan pada sejumlah tantangan kompleks yang berpotensi mengurangi efektivitasnya. *Pertama*, lemahnya permintaan kredit dari dunia usaha akibat ketidakpastian ekonomi global. Lemahnya permintaan kredit antara lain disebabkan masih banyaknya hambatan investasi. Apabila investasi terhambat dan permintaan kredit melemah, bank akan memilih menyalurkan kredit ke sektor konsumtif yang cenderung tidak banyak memberikan dampak pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, jumlah kredit yang belum dicairkan oleh nasabah di bank umum pada Juli 2025 meningkat 9,52 persen secara tahunan (Primantoro, 2025). Rasio kredit yang disalurkan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) atau *loan-to-deposit ratio* (LDR) pada Juli 2025 tumbuh 86,54 persen, stabil dibanding pada bulan sebelumnya yang sebesar 86,40 persen (Estherina, 2025). Angka ini menandakan perbankan masih memiliki ruang untuk menyalurkan kredit, sehingga hambatan utamanya adalah lemahnya permintaan. Kondisi ini berisiko menyebabkan dana mengendap di perbankan atau dialihkan ke instrumen surat berharga, meskipun Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, telah memberikan larangan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) karena dapat menghambat penyaluran kredit dan pertumbuhan sektor riil.

Kedua, kualitas kredit yang berpotensi memburuk jika bank menyalurkan dana secara agresif. Penyaluran kredit bank kepada masyarakat akan menimbulkan risiko gagal bayar/*NonPerforming Loan* (NPL). NPL yang timbul bisa disebabkan oleh masyarakat mengalami kesulitan untuk melakukan pengembalian dana karena tidak mampu atau sengaja tidak mengembalikan. Hal ini tentunya akan memengaruhi kinerja bank (Alviani, 2022). Kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit juga terefleksi dari adanya penurunan kualitas, tercermin dari jumlah kredit bermasalah yang mencapai 2,28 persen per Juli 2025 atau lebih tinggi dari posisi 2,08 persen di akhir 2024 (Ardianto, 2025).

Ketiga, keamanan dana pemerintah yang penjaminannya terbatas. Menurut pakar ekonomi perbankan Binus University, Dody Arifianto, penempatan di Bank Indonesia (BI) lebih terjamin dibanding di bank umum, mengingat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hanya menanggung simpanan maksimal Rp2 miliar per rekening per bank (“Dana Rp200 Triliun”, 2025).

Keempat, aspek tata kelola dan *moral hazard*. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai bahwa penyaluran dana ini tidak serta merta menggerakkan perekonomian. Hal ini bergantung pada bagaimana perbankan menentukan program untuk penyaluran dana. Bhima juga mendorong agar penyaluran kredit ditargetkan kepada sektor yang menciptakan lapangan kerja hijau, mengingat



kontribusi bank Himbara untuk energi terbarukan masih di bawah satu persen (Aria, 2025). Tanpa pengawasan yang ketat, bank dapat melakukan arbitrase dengan menerima dana dari pemerintah pada bunga empat persen dan menempatkannya kembali pada SBN atau SRBI yang berbunga lebih tinggi, sehingga dana tidak sampai ke sektor riil.

Pemerintah perlu memperkuat kebijakan dengan beberapa langkah krusial. *Pertama*, menstimulasi permintaan kredit dengan memperbaiki iklim investasi melalui deregulasi dan insentif fiskal bagi sektor prioritas. *Kedua*, menerapkan skema penjaminan kredit khusus untuk proyek-proyek produktif. *Ketiga*, keamanan dana pemerintah dapat dijaga dengan skema penjaminan khusus di luar skema LPS konvensional. *Keempat*, pengawasan yang ketat untuk mencegah arbitrase dan memastikan dana tidak dialihkan ke SBN/SRBI dengan sanksi bagi bank yang melanggar.

Penutup

Kebijakan penempatan dana pemerintah ke Himbara memiliki potensi strategis untuk meningkatkan likuiditas dan mendukung program prioritas. Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh penyaluran dana, tetapi juga oleh langkah komprehensif untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, menerapkan pengawasan yang ketat, dan memastikan alokasi kredit tepat sasaran ke sektor-sektor produktif agar benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Komisi XI DPR RI perlu memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap penyaluran kredit agar tepat sasaran pada sektor produktif dan hijau yang menciptakan lapangan kerja. Selain itu, Komisi XI DPR RI dapat mendorong pemerintah dan OJK untuk menyederhanakan hambatan investasi guna mendongkrak permintaan kredit serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana untuk program prioritas guna memaksimalkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.



Referensi

- Ardianto, P. (2025, September 14). Himbara diguyur Rp200 T, OJK: Awas NPL. *Investor.id*. <https://investor.id/finance/409497/himbara-diguyur-rp-200-t-ojk-awas-npl>
- Aria, N. (2025, September 14). Suntikan dana ke Bank BUMN dikhawatirkan tak dongkrak ekonomi. *Tirto.id*. <https://tirto.id/suntikan-dana-ke-bank-bumn-dikhawatirkan-tak-dongkrak-ekonomi-hhJn>
- Aviliani, A. (2022). Indonesian banking strategy in improving credit distribution. *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 3(2), 310-319. <https://doi.org/10.31933/dijdbm.v3i2>
- Bank Himbara dapat suntikan Rp200 T, untuk apa? (2025, September 13). *Cnn Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250912173110-532-1273102/bank-himbara-dapat-suntikan-rp200-t-untuk-apa>
- Dana Rp 200 triliun masuk bank BUMN, dorongan kredit atau risiko baru? (2025, September 12). *Kontan.co.id*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/dana-rp-200-triliun-masuk-bank-bumn-dorongan-kredit-atau-risiko-baru>
- Estherina, I. (2025, September 4). OJK ungkap pertumbuhan kredit perbankan per Juli 2025 masih melambat. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/ekonomi/ojk-ungkap-pertumbuhan-kredit-perbankan-per-juli-2025-masih-melambat-2066502>
- Kementerian Keuangan. (2025). Pemerintah hari ini mulai salurkan dana Rp200 triliun ke 5 bank milik negara. *Kementerian Keuangan*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pemerintah-Hari-Ini-Salurkan-200-Triliun>
- Primantoro, A. Y. (2025, September 15). Dana Rp200 triliun mengarah ke program strategis Prabowo. *Kompas.id*. https://www.kompas.id/artikel/dapat-suntikan-dana-negara-bank-janji-salurkan-kredit-ke-sektor-produktif?status=sukses_login&utm_source
- Rianto, M. N. (2025, September 12). Dampak guyuran Rp200 triliun dana pemerintah ke bank terhadap perekonomian. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2025/09/12/131756126/dampak-guyuran-rp-200-triliun-dana-pemerintah-ke-bank-terhadap-perekonomian?page=all>
- Sukmawijaya, A. (2025, September 15). Rosan minta dana Rp200 T di Himbara untuk dongkrak ekspor dan lapangan kerja. *Kumparan.com*. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/rosan-minta-dana-rp-200-t-di-himbara-untuk-dongkrak-ekspor-dan-lapangan-kerja-25rLsiBH5lf/full>

